



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

TesisGmh'2003

TANDA PENGESAHAN TESIS

N a m a : Windu Kurniawan
Nomor Mahasiswa : 01.743/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Dan Motor Antik Dan Implikasinya Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tanggal, 11-02-09

Tanggal,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

IswantIningsih, SH., MS.

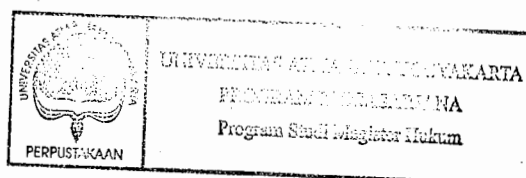
Y. Hartono, SH., M.Hum.



etua Program,

PROGRAM
PASCASARJANA

Dr. MG. Endang Sumlarni, Dra., SH., M.Hum.





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Tesis@mh'2003

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR MOBIL DAN MOTOR
ANTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

WIndu Kurniawan, SH.
No. Mhs : 01.743/PS/MH

Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
pada tanggal : 4 Juli 2003

Dewan Penguji :

Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum.
Ketua

Iswantiningsih, SH., MS.
Anggota

Y. Hartono, SH., M.Hum.
Anggota

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya pribadi dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah sebelumnya ada. Semua yang tertulis baik berupa data, teks, gambar, tabel, analisis, kesimpulan dan rekomendasi, kecuali yang telah secara tertulis diacu dalam tesis ini adalah murni karya saya dan merupakan hasil kerja pribadi.

Yogyakarta, Desember 2003



(Windu Kurniawan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Antik dan Implikasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Penulisan tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh derajat strata-2 pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam Penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dorongan dan perhatian yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala keikhlasan hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. E. Kusumadmo, MM. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode 1995-2003.
2. Bapak Dr. Slamet S. Sarwono M.Ba. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ir. Peter F. Kaming, M.Eng. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode September 2000- April 2003.
4. Ibu. Dr. J. Sukmawati, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode 1997-2003.
6. Ibu. Dr. MG. Endang S., Dra, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Ibu.Iswatiningsih., SH, MS., selaku Dosen Pembimbing I pada penulisan tesis ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
8. Bapak Y. Hartono, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II pada penulisan tesis ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
9. Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memberi bekal kepada penulis berupa ilmu dalam menempuh studi Magister Ilmu Hukum ini.
10. Bapak dan Ibu pada Bagian Administrasi Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama ini.
11. Bapak dan Ibu pada Bagian Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
12. Bapak dan Ibu di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
13. Bapak dan Ibu di Motor Antik Club Indonesia (MACI) Yogyakarta, Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), Persatuan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI), Yogyakarta American Jeep (YAJ) dan Persatuan Penggemar Mobil, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan.
14. Para Bro's Biker, Pak Aan "shovel", Lik Bayus, Pakde Agus, Pak Sugeng, Dadung, Erika, Silva, Antok, Rully, Arif, Iwan, Ipunk dan seluruh saudara dalam perjalanan "**OUR SPIRIT UNITED BY THE OLD BIKE**".
15. Kepada seluruh rekan-rekan di Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pak Syahwan Sapuan, Rina, Rini, Donna, Pipin, Ucok, Ari Kentang, Dana, Wisnu, Edith, Tulus, Dwi, Handogo dan rekan-rekan lainnya yang tidak mampu untuk dituliskan satu persatu "*I hate skool*".

16. Kekasihku tersayang Dian Sastro Wardoyo, Agnes Monica, Kris Daryanti, Siti Nurhaliza, Inul Daratista, Annisa Bahar, Sarah Azhari, Ayumi Kawashima Maaf keputusanku telah menyakitimu.

17. Terakhir dan penting, kepada Pakne, Simak, Kakak-kakakku dan saudara-saudaraku. "Aku lulus pak, mak"

18. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kelebihan dan keistimewaan, untuk itu demi keselamatan jiwa anda dengan segala kerendahan hati penulis tidak mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun ataupun tidak dari berbagai pihak.

Yogyakarta, Mei 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	9
I.3. Tujuan Penelitian	10
I.4. Manfaat Penelitian	10
I.5. Keaslian Penelitian	10
I.6. Sistematika Penulisan	11
I.7. Batasan Konsepsional	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
II.1. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Antik.....	14
II.2. Perlengkapan Surat Kendaraan Bermotor	16
II.3. Pengertian Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Antik	19

II.4. Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber

Pendapatan Asli Daerah..... 22

BAB III. CARA PENELITIAN..... 29

III.1. Jenis Penelitian..... 31

III.2. Nara Sumber..... 33

III.3. Analisis Bahan Hukum..... 35

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 38

IV.1. Gambaran Umum Kendaraan Bermotor

Mobil dan Motor Antik..... 38

IV.1.1. Keberadaan Kendaraan Bermotor

Mobil dan Motor Antik..... 40

IV.1.2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Mobil dan Motor Antik..... 44

IV.2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang

No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... 48

IV.2.1. Perbedaan antara upaya pemutihan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dengan pendaftaran kendaraan

bermotor mobil dan motor antik..... 53

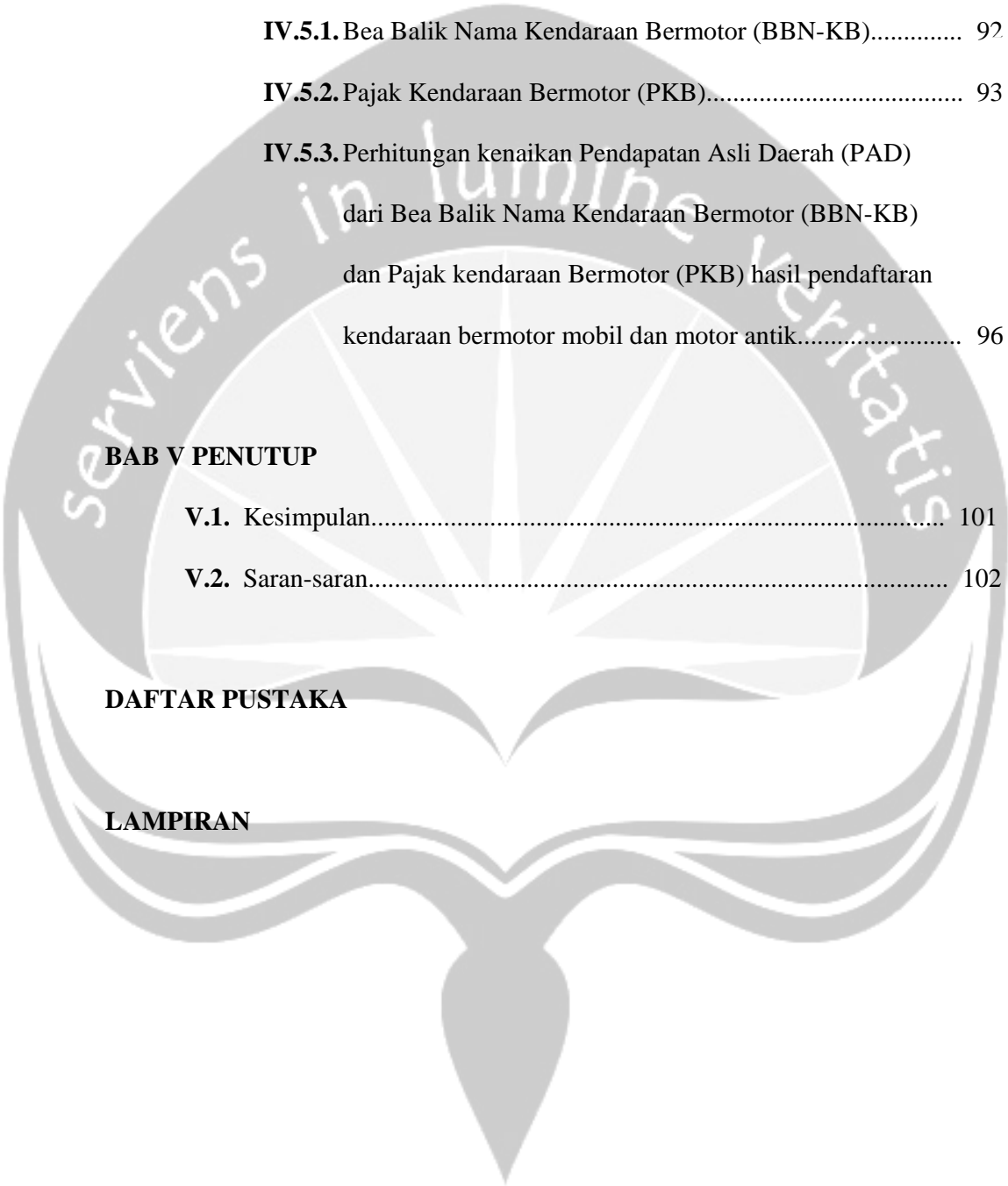
IV.2.2. Pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan

motor antik beserta kendalanya..... 55

IV.3. Pendapatan Asli Daerah Sebagai Penunjang Otonomi Daerah..... 60

IV.4. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB dan STNK)

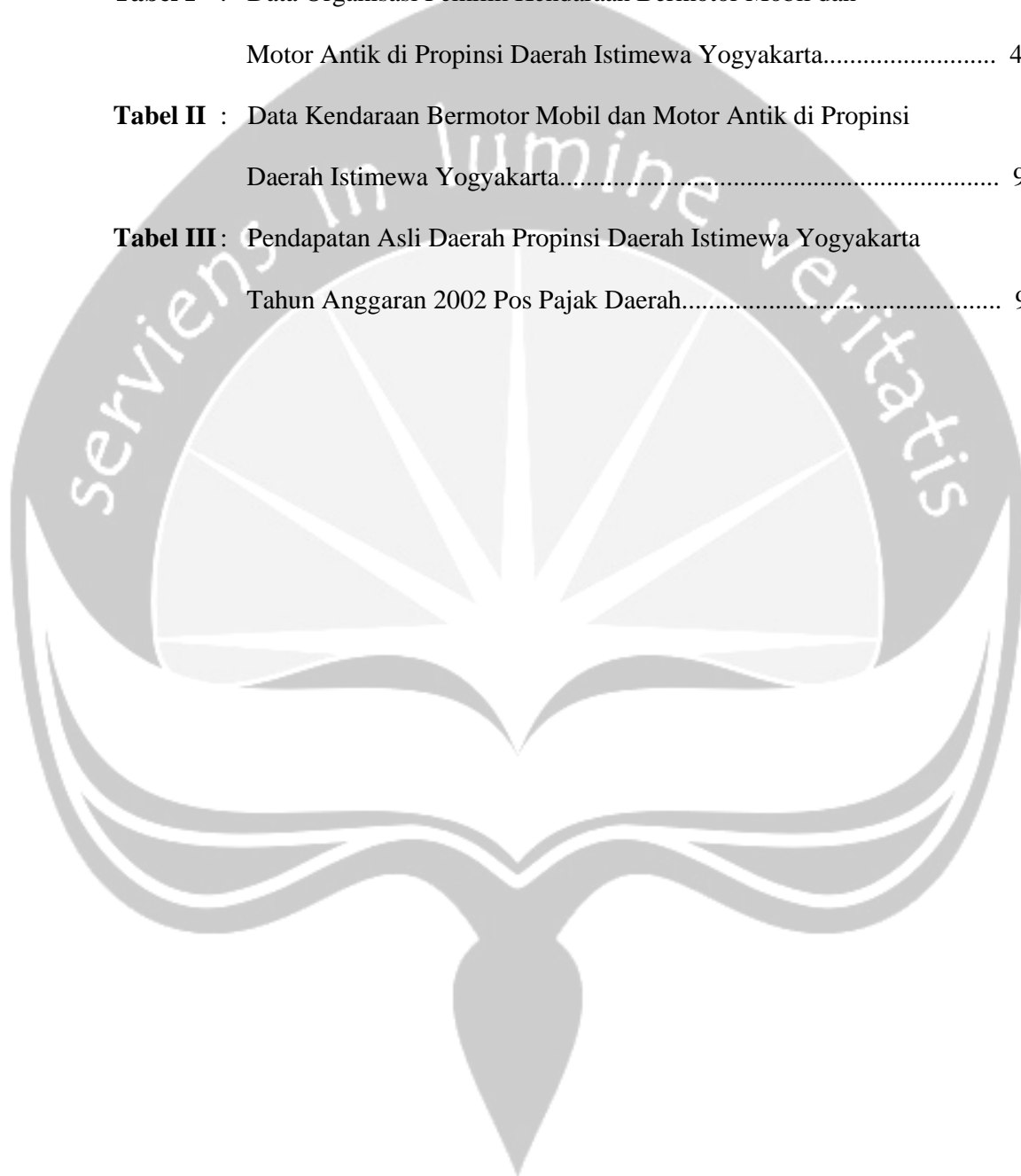
Sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kendaraan



Bermotor Mobil dan Motor Antik.....	70
IV.5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pendaftaran	
Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Antik.....	86
IV.5.1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).....	92
IV.5.2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	93
IV.5.3. Perhitungan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) hasil pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik.....	96
BAB V PENUTUP	
V.1. Kesimpulan.....	101
V.2. Saran-saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Data Organisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Antik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	43
Tabel II : Data Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Antik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	97
Tabel III : Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2002 Pos Pajak Daerah.....	99



INTISARI

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya keluhan dari para pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik, dikarenakan mengalami kesulitan ketika melakukan pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antiknya. Padahal dipacunya pembangunan dengan menggali potensi masing-masing daerah melalui penerapan otonomi daerah di negara Indonesia, menuntut intensifikasi terhadap sumber keuangan daerah yang telah ada. Pendaftaran kendaraan bermotor sebagai bagian dari pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah perlu dimaksimalkan pemungutannya.

Pendaftaran kendaraan bermotor merupakan kewajiban bagi pemiliknya. Salah satu persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor adalah surat faktur kendaraan bermotor. Karena berbagai keadaan maka sebagian besar kendaraan bermotor mobil dan motor antik tidak memiliki surat faktur kendaraan bermotor sehingga pendaftarannya tidak dapat dilakukan. Pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik akan berdampak lebih luas dari sekedar pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Permasalahan tersebut diteliti dengan tujuan mengetahui dan melakukan penemuan hukum untuk kepentingan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Antik dan Implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengambil contoh di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Kepolisian dalam upaya melakukan pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik. Dengan cara mencari solusi bagi pengganti surat faktur kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma berupa peraturan perundang-undangan untuk memperoleh bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang didapat dari narasumber. Perolehan kedua bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisa dengan penalaran hukum melalui interpretasi dan evaluasi dengan memperhatikan fakta yang terjadi dalam praktek.

Hasil dari analisis bahan hukum, dapat disimpulkan bahwa solusi surat faktur kendaraan bermotor dapat digantikan dengan permohonan penetapan pengadilan sebagai pengganti surat faktur. Peningkatan pendapatan asli daerah setelah pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik tidak signifikan bila dibandingkan dengan besarnya jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada umumnya. Tetapi yang terpenting adalah subyek hukum yang terlindungi haknya.

Pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik dapat terlaksana memang memerlukan niat, kreatifitas dan keberanian dari para pihak yang berwenang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor untuk melakukan dobrakan atas kakunya perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata kunci :

Perlindungan hukum, Kendaraan bermotor mobil dan motor antik, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This research is run by many complains come from the owner of antique cars dan motorcycles, related to the registration proscedure which seems to be complecated. On the other hand, get in touch with the development program through discovering the regional resource under regional goverment autonomy, the intensification for financial resources in province level is absolutely needed. One of the financial resources is derived from the taxation, including the registration fee for motorized vehicle.

The motoized vehicle registration is obligated for the owners. One of the requirements for the registration is the invoice letter. In fact, there are many of the antique cars/motorcycles that are not equipped by an invoice letter, so that they are not able to fulfill the registration-requirements. This condition has more effect than to the regiional income through Motorized Vehicle Tax (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB) and Name Reversed Fee-for Motorized Vehicle (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB).

The research about the problem above is run to find a legal invention and to bring about a legal protection for the owner of antique cars/motorcycles as well as to bring around it's implications to the original-regional income, in the case Daerah Istimewa Yogyakarta. Hoopefully, this research will donate some inputs to Dinas Pendapatan Daerah (Province-Income Official) and also kepolisian (The State Police) in motivating and finding the solution for the owners of antique cars/motorcycles, which are not equipped with the invoice letter, to do the registration.

This research is conducted under the juridical-approach, by doing research towards norms of ordinances, in order to find the primary act material and secondary act material which are derived from the resource person. Those two materials are going to be analyzed through law-analysis, by interpreting and evaluating them based on the facts in practice.

The result of this study is the solution by substituting the invoice letter with Proposal Decree Jurisdiction. In the point of view of tax income level, the tax from antique cars/motorcycles registration is not placed in the significant proportion rather than Motorized Vehicle Tax (PKB) and Name Reversed Fee-for Motorized Vehicle (BBN-KB). Anyway, the most important is to protect the subjects.

The registration will be success with cooperation between persons who have obligation in this matter, and of course, it needs their goodwill, creativity and courage to break this complicated and awkward bureaucracy.

Keywords :

Legal protection, antique cars/motorcycles-motorized vehicle, original regional income